



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RAPIUDDIN THAHIR
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN
3. NHK : 196222

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 870.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m2/180 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA LUWU, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. Tanah Seluas 540 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
5. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
6. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
7. Tanah Seluas 540 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 131.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1,5 VELOZ A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 54.600.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 603.061.833



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.658.661.833

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.658.661.833

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.